

SUARA KEADILAN GENDER DALAM RUBRIK SWARA HARIAN KOMPAS TAHUN 1999–2011

Millenio Febrian Siswanto

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: millenio.18064@mhs.unesa.ac.id

Riyadi

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: riyadi@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian yang berjudul "Suara Keadilan Gender dalam Rubrik Swara Harian Kompas dari Tahun 1999 hingga 2011" mengeksplorasi bagaimana wacana keadilan gender diartikulasikan melalui rubrik Swara Harian Kompas. Transisi dari rezim Orde Baru ke era Reformasi memicu munculnya gelombang demokratisasi media. Harian Kompas melihat perlunya sebuah segmen khusus untuk menjawab tantangan tersebut.

Studi ini membahas: (1) landasan intelektual yang melatarbelakangi berdirinya Harian Kompas dan rubrik Swara; (2) pesan-pesan feminis yang disampaikan melalui rubrik Swara di Harian Kompas; dan (3) perkembangan muatan keadilan gender dalam rubrik Swara Harian Kompas dari tahun 1999 hingga 2011. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian sejarah ini mencakup heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber primer dari Perpustakaan Daerah Jawa Timur; kritik sumber, yakni pengujian dan verifikasi terhadap sumber-sumber yang diperoleh; interpretasi, yaitu analisis dan penafsiran atas data dan fakta yang dikumpulkan; serta historiografi, yaitu penyajian narasi sejarah secara kronologis dan kritis. Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Harian Kompas merespons perkembangan wacana keadilan gender di Indonesia pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Kata Kunci: Ibuisme Negara, Patriarki, Keadilan Gender, Kesetaraan Gender.

Abstract

*The research titled *Voices of Gender Justice in the Swara Column of Kompas Daily Newspaper, 1999–2011* discusses how discourse on gender justice was voiced through the Swara column of Kompas. The regime change from the New Order to the Reform Era revived the spirit of media democratization. Kompas Daily considered that a specific segment was needed to respond to this challenge.*

This research discusses (1) the history of thought underlying the publication of Kompas Daily and the Swara column; (2) the feminist messages conveyed in the Swara column of Kompas newspaper; and (3) the development of gender justice content in the Swara column of Kompas Daily from 1999 to 2011. The steps taken in this historical research include heuristics in the form of collecting primary sources from the East Java Regional Library, source criticism in the form of examining and verifying the sources obtained, interpretation by interpreting the data and facts obtained, and historiography through the chronological and critical writing of history.

Keyword: State Ibuism, Patriarchy, Gender Justice, Gender Equality

PENDAHULUAN

Harian *Kompas* pertama kali terbit pada Juni 1965, sebuah masa di mana Indonesia tengah dilanda ketidakstabilan politik dan ekonomi. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, *Kompas* didirikan dengan semangat untuk menyediakan informasi yang seimbang di tengah maraknya pers yang berafiliasi dengan berbagai partai politik. Ide pendirian *Kompas* dimunculkan oleh Panglima TNI AD Letjen Ahmad Yani dan kemudian diteruskan kepada Frans Seda, Ketua Partai Katolik dan Menteri Perkebunan pada masa itu.

Bersama dua rekannya yang ahli di bidang media, Petrus Kanisius (PK) Ojong dan Jakob Oetama, Frans Seda mengkonsolidasikan niat untuk mendirikan sebuah surat kabar yang netral dan berpihak pada kepentingan publik tanpa afiliasi politik tertentu. *Kompas* pun hadir dengan tagline *Amanat Hati Nurani Rakyat*, yang mencerminkan tujuan untuk menjadi media yang independen, mengawasi kebijakan pemerintah, dan memberikan kontrol sosial melalui jurnalisme yang tajam.¹

Seiring berjalannya waktu, meskipun *Kompas* menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembredelan pada masa Orde Baru, surat kabar ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebebasan pers dan kritik terhadap pemerintah. Salah satu peristiwa penting yang menggambarkan keteguhan tersebut adalah pembredelan *Kompas* pada tahun 1978 setelah menerbitkan berita mengenai aksi mahasiswa, yang kemudian diikuti dengan pemaksaan untuk menandatangani pernyataan yang membatasi ruang gerak media.² Namun, *Kompas* kembali menerbitkan pada 6 Februari 1978 setelah kompromi dengan rezim Orde Baru.

Masa kepemimpinan Soeharto dikenal ideologi *State ibuisism* ideologi yang dijalankan untuk strategi Pembangunan Nasional. Ideologi yang berpandangan bahwa peran perempuan terbatas sebagai istri, ibu, dan penjaga keluarga. Ibuisme adalah ideologi yang mendukung setiap ibu yang merawat keluarga, kelompok, kelas, bisnis, atau negara bagian tanpa menuntut kekuasaan atau ketenaran sebagai imbalan.³

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam tatanan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Reformasi membuka ruang bagi berbagai kelompok, termasuk perempuan, untuk mengemukakan aspirasi dan memperjuangkan kesetaraan gender. Di tengah perubahan tersebut, muncul gerakan perempuan yang menuntut pengakuan terhadap keberagaman dan peran perempuan dalam ranah publik, sekaligus menantang pandangan Orde Baru yang mengedepankan ideologi *State Ibuism*, yang

memandang perempuan hanya sebagai pendamping suami dan penjaga keluarga.

Di tengah krisis moneter yang melanda Indonesia pada masa itu, kelompok perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli (SIP) melakukan aksi sosial sebagai bentuk protes terhadap kondisi ekonomi yang semakin sulit. Aksi ini mengubah paradigma mengenai peran perempuan dalam masyarakat, yang sebelumnya terkungkung dalam ideologi domestik. Gerakan ini memberi inspirasi bagi *Kompas* untuk menyediakan ruang bagi perempuan dalam bentuk rubrik khusus yang bernama *Swara*.

Rubrik *Swara* pertama kali terbit pada 6 Mei 1999 sebagai sebuah suplemen tambahan dalam *Harian Kompas*. Rubrik ini tidak hanya menawarkan informasi praktis bagi perempuan, tetapi juga menanggapi kebutuhan strategis perempuan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pasca-Orde Baru. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berpihak pada isu-isu keadilan gender, *Swara* menjadi salah satu terobosan penting dalam upaya media massa di Indonesia untuk memfasilitasi suara perempuan yang sebelumnya terabaikan dalam wacana publik.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai peran rubrik *Swara* dalam menyuarakan keadilan gender di *Harian Kompas* antara tahun 1999 hingga 2011. Penelitian ini akan membahas beberapa aspek, antara lain: pertama, sejarah pemikiran yang mendasari terbitnya *Harian Kompas* dan rubrik *Swara*; kedua, pesan-pesan feminisme yang disampaikan melalui *Swara*; dan ketiga, perkembangan konten keadilan gender dalam rubrik *Swara* dari waktu ke waktu. Penelitian ini penting dilakukan mengingat terbatasnya kajian sejarah sosial, terutama yang berhubungan dengan isu gender dalam media Indonesia. Sebelumnya, beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Swara* lebih banyak dilihat dari sudut pandang komunikasi dan studi feminisme, namun kajian sejarah yang lebih mendalam mengenai topik ini masih jarang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi kekosongan tersebut, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana media, dalam hal ini *Harian Kompas*, merespons perubahan sosial dan budaya yang dipicu oleh Reformasi, dengan memberikan ruang bagi suara perempuan melalui rubrik *Swara*.

Batasan masalah diperlukan agar pembahasan dalam penelitian melebar keluar konteks. Batasan yang ditetapkan terdiri dari dua batasan yaitu batasan spasial (tempat) dan temporal (waktu). Ruang lingkup temporal yang digunakan dalam penelitian ini berkisar dari tahun 1998-2011. Penentuan tahun 1998 menjadi titik awal

¹ Rizal Mallarangeng. 2010. *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta. PT Gramedia, hal. 52.

² Jimmy S. Harianto. 2022. "Hari-hari Seusai Kompas Dibredel Via Telepon." [https://www.kompas.id/baca/di-balik-](https://www.kompas.id/baca/di-balik-berita/2022/02/04/kompas-dibredel-via-telpon-wartawan-tetap-liputan)

[berita/2022/02/04/kompas-dibredel-via-telpon-wartawan-tetap-liputan](https://www.kompas.id/baca/di-balik-berita/2022/02/04/kompas-dibredel-via-telpon-wartawan-tetap-liputan) (diakses pada 16 Maret 2024, pukul 19.55).

³ Mochamad Arief Wicaksono. 2018. Mereka Yang Tidak Dibayar Tinggi: Ibuisme, Taman Kanak-kanak, dan Kampung di Indramayu. *Jurnal Etnografi Indonesia*, vol. 3, no. 2, hal. 122.

penelitian memiliki alasan karena tahun tersebut adalah awal terbitnya Rubrik Suara dalam Harian Kompas yang bersinggungan dengan momentum reformasi. Titik akhir penelitian ini adalah tahun 2011 karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir Rubrik Suara terbit dan lingkup spasial berupa surat kabar Harian Kompas.

Istilah "perempuan" dalam Bahasa Indonesia pada dasarnya merujuk pada jenis kelamin secara biologis, namun dalam praktik sosial sehari-hari juga mencerminkan konstruksi gender. Konsep gender sendiri mengacu pada peran, tanggung jawab, dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui proses sosialisasi dan diwariskan lintas generasi.⁴ Dengan demikian, gender bersifat historis, dinamis, dan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan politik dalam suatu masyarakat.

Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki (umumnya maskulin) dan perempuan (umumnya feminim). Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.⁵

Pembagian peran dalam perspektif historis yang berbasis gender telah menciptakan struktur hierarkis yang menempatkan laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik. Pola ini tercermin dalam paradigma struktural-fungsional yang berkembang sejak masyarakat pra-aksara, ketika laki-laki diasosiasikan sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu.⁶ Warisan pembagian kerja berbasis jenis kelamin ini terus bertransformasi dalam berbagai sistem masyarakat, termasuk sistem kapitalis modern yang menekankan efisiensi dan produktivitas namun kerap mengabaikan ketimpangan berbasis gender.

Ikhlasiah Dalimoenthe mengklasifikasikan peran gender ke dalam tiga kategori: produktif (penghasilan barang/jasa), reproduktif (fungsi biologis dan sosial), dan sosial (kegiatan kemasyarakatan).⁷ Seiring waktu, ketiga peran tersebut lebih dibebankan pada perempuan tanpa pengakuan yang setara, baik dalam ruang publik maupun domestik. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran gender tidak semata-mata bersifat kodrati, melainkan dikonstruksi oleh nilai-nilai sosial yang dominan pada masanya.

Ketimpangan gender yang muncul dari konstruksi historis ini tercermin dalam berbagai bentuk seperti subordinasi, marginalisasi, beban ganda, stereotip, dan kekerasan berbasis gender. Contohnya, dalam masyarakat Jawa dikenal adagium *macak, manak,*

masak yang merepresentasikan domestikasi peran perempuan dan direproduksi secara turun-temurun. Pemahaman ini memperlihatkan bagaimana konstruksi gender melekat kuat dalam sejarah budaya lokal, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan keadilan gender di masa kini.

Konsep keadilan gender merupakan konsep normatif yang berupaya menjamin akses, kesempatan, dan hasil pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Secara teoritis, keadilan gender berpijak pada asas bahwa perbedaan biologis tidak boleh menjadi dasar perlakuan diskriminatif atau pembatasan peran dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konsep keadilan yang dikemukakan oleh filsuf politik John Rawls dapat menjadi kerangka etis awal dalam memahami keadilan sosial, termasuk keadilan berbasis gender.

Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan, yakni prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan serta persamaan kesempatan. Prinsip pertama menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain, sedangkan prinsip kedua mengakui keberadaan ketimpangan sosial dan ekonomi sejauh ketimpangan tersebut memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling dirugikan, dan jabatan publik terbuka bagi semua orang secara adil. Namun, bila diterapkan dalam konteks relasi gender di masyarakat, ditemukan jarak antara ideal keadilan Rawlsian dan praktik sosial yang masih sarat ketimpangan gender.

Upaya formalisasi prinsip keadilan gender dalam konteks Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dokumen ini mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pembangunan.⁸ Instruksi tersebut mengakui keadilan gender sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dan demokrasi.

Kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan, diukur melalui dua indikator utama, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.⁹ Sementara itu, IDG menilai tingkat partisipasi dan kontrol perempuan dalam ranah politik,

⁴ Ikhlasiah Dalimoenthe. 2021. *Sosiologi Gender*. Jakarta. Bumi Aksara, hal. 13.

⁵ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2019. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, hal. 334.

⁶ Marzuki. 2007. *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*. Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, vol. 4, no. 2, hal. 70.

⁷ Ikhlasiah Dalimoenthe. Op.cit., hal. 21-23.

⁸ Indonesia. 2000. Inpres No. 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

⁹ Nugrahini Susantinah Wisnujati. 2020. *Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, vol. 20, no. 2, hal 67-81.

ekonomi, dan pengambilan keputusan.¹⁰ Indikator-indikator ini penting untuk menganalisis apakah suatu kebijakan atau wacana publik, termasuk yang dimuat di media, benar-benar mendukung keadilan gender secara substantif.

Menggunakan kerangka ini, kajian atas rubrik Swara di Harian Kompas dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana media arus utama pasca-Reformasi memberi ruang bagi representasi perempuan dan gagasan kesetaraan gender. Dimensi-dimensi seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik, sebagaimana tercermin dalam IPG dan IDG, menjadi alat bantu analitis untuk menilai keberpihakan rubrik ini terhadap prinsip keadilan gender.

Pers memegang peran penting sebagai agen perubahan sosial dan instrumen kontrol terhadap kekuasaan dalam kajian sejarah media Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang menjalankan fungsi jurnalistik. Kegiatan jurnalistik ini meliputi pencarian, perolehan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyampaian informasi dalam berbagai bentuk, baik tulisan, suara, gambar, data, grafik, maupun bentuk lainnya, yang disebarluaskan melalui media cetak, elektronik, dan kanal komunikasi lainnya.

Secara historis, fungsi pers mencakup tiga peran utama: pertama, sebagai penyedia informasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu aktual; kedua, sebagai sarana edukasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ketiga, sebagai media hiburan yang menjadi ruang rekreasi publik.¹¹ Dalam negara demokratis seperti Indonesia pasca-Reformasi, pers memainkan fungsi strategis dalam dinamika politik sebagai *the fourth estate*, yakni kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹²

Kebebasan pers yang dijamin oleh sistem demokrasi, memunculkan konsep pers libertarian, yang menekankan pentingnya kebebasan dari intervensi negara. Prinsip utama dari sistem ini adalah bahwa setiap individu, baik mayoritas maupun minoritas, harus memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan pendapat melalui media massa. Oleh karena itu, surat kabar sebagai bentuk konkret dari pers harus menjadi ruang terbuka bagi berbagai gagasan, termasuk aspirasi kelompok marginal.

Salah satu aktor penting dalam sejarah pers nasional adalah Harian Kompas, yang sejak berdiri pada tahun 1965 telah berperan dalam membentuk opini publik dan mengawal transformasi sosial-politik Indonesia. Kompas dikenal tidak hanya karena konsistensinya

dalam menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme profesional seperti verifikasi, independensi, dan loyalitas kepada warga, tetapi juga karena penerapannya atas jurnalisme advokasi. Dalam praktik ini, jurnalis tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan sosial yang berpihak kepada kelompok yang termarginalkan. Prinsip ini dikenal dengan istilah *voicing the voiceless*.

Rubrik ini menjadi medium advokasi yang membingkai isu-isu perempuan, keadilan sosial, dan hak-hak warga kelas bawah. Untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana isu-isu tersebut diangkat, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing, khususnya model yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Analisis ini sangat berguna dalam melihat bagaimana media secara aktif membentuk realitas sosial melalui pembingkai wacana.

Model Entman terdiri dari empat unsur utama, yaitu: (1) *define problems*, mendefinisikan persoalan yang dianggap penting; (2) *diagnose causes*, mengidentifikasi penyebab persoalan tersebut; (3) *make moral judgment*, menilai secara moral tindakan atau keadaan tertentu; dan (4) *treatment recommendation*, menyarankan solusi atau tindakan tertentu.¹³ Keempat unsur ini memungkinkan peneliti memahami secara historis bagaimana wacana gender dan keadilan sosial dikonstruksi dalam ruang redaksi surat kabar.

Lebih lanjut, analisis framing bertumpu pada dua paradigma besar dalam studi media: paradigma positivis dan konstruksionis. Paradigma positivis melihat media sebagai saluran netral yang menyampaikan fakta secara objektif, sedangkan paradigma konstruksionis memandang media sebagai aktor aktif yang secara sadar membingkai realitas melalui narasi tertentu, sesuai dengan nilai dan perspektif redaksi.

Memahami cara kerja media dalam membingkai realitas, khususnya melalui rubrik seperti Swara, kajian sejarah dapat menggali peran media sebagai agen perubahan budaya dan sosial pasca-Reformasi. Penelitian ini, oleh karena itu, tidak hanya berkontribusi pada kajian sejarah pers, tetapi juga pada pemahaman historis mengenai transformasi wacana gender dalam masyarakat Indonesia melalui media massa.

Era Reformasi membuka jalan bagi liberalisasi pers di Indonesia. Sebelumnya, selama rezim Orde Baru, kebebasan pers dibatasi melalui kebijakan yang represif seperti kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sebagaimana diatur dalam Peraturan

¹⁰ Dina Salsabila dan Muhammad Yunus Hendrawan. 2021. Analisis Kondisi Pemberdayaan Gender di Indonesia Tahun 2020 dengan Agglomerative Hierarchical Clustering dan Biplot. Seminar Nasional Official Statistics 2021, vol. 2021, no. 1, hal. 205.

¹¹ Suroso. 2021. Jurnalisme Dasar Teori dan Praktek. Yogyakarta. Cantrik Pustaka, hal. 18.

¹² Tjipta Lesmana. 2005. Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 1, hal. 5.

¹³ Ade Kurniawan Siregar dan Eka Fitri Qurniawati. 2022. Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di Tempo.co. Journal of New Media and Communication, vol. 1, no. 1, hal. 8.

Menteri Penerangan Nomor 01/Pers/Menpen/1984.¹⁴ Pencabutan SIUPP secara sepihak digunakan sebagai alat untuk mengontrol narasi publik, menjadikan media massa sebagai corong propaganda negara. Dalam konteks itu, Reformasi 1998 menjadi titik balik penting bagi kebangkitan jurnanisme yang lebih independen dan kritis.

Dibalik *euforia* demokratisasi tersebut isu-isu perempuan cenderung terpinggirkan dari narasi besar perjuangan reformasi. Pengalaman dan tragedi perempuan kerap diserap ke dalam pendekatan humanistik dan struktural semata, tanpa menyentuh persoalan representasi dan keadilan gender secara substansial. Rubrik Swara, yang diterbitkan oleh Harian Kompas, hadir sebagai respons terhadap kekosongan naratif ini. Rubrik ini mengungkap pendekatan jurnanisme advokasi dengan perspektif gender sebagai kerangka utamanya, menjadikannya salah satu tonggak penting dalam sejarah jurnanisme Indonesia pasca-Reformasi.

Rubrik Swara menandai pergeseran paradigma dalam sejarah pers Indonesia. Tidak hanya menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan rekreatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi juga menjalankan fungsi advokatif. Swara memanfaatkan jurnanisme sebagai alat untuk mengartikulasikan suara kelompok marjinal, khususnya perempuan, yang selama ini diabaikan oleh media arus utama. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *voicing the voiceless* mewakili suara-suara yang selama ini bisu dalam wacana publik.

Jurnanisme advokasi yang diterapkan oleh Swara berakar pada prinsip-prinsip jurnanisme profesional sebagaimana dirumuskan oleh Kovach dan Rosenstiel.¹⁵ Hal ini mencakup komitmen terhadap kebenaran, loyalitas kepada publik, disiplin verifikasi, independensi, serta fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Swara tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mengarahkan perhatian publik pada isu-isu keadilan gender di berbagai sektor: industri hiburan, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seksualitas.

Swara dalam kerangka teori komunikasi massa, menjalankan fungsi agenda setting, yaitu membentuk prioritas isu di ruang publik. Media tidak hanya merefleksikan realitas, melainkan secara aktif membingkai (*framing*) dan mengonstruksi makna atas realitas sosial. Oleh karena itu, kehadiran Swara dapat dipahami sebagai intervensi historis dalam diskursus media yang sebelumnya cenderung maskulin dan elitis.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji keberadaan Swara sebagai bagian dari dinamika sejarah media dan gerakan perempuan. Salah satu studi awal dilakukan oleh Nila Nurlimah (2005) melalui pendekatan survei kuantitatif, yang meneliti pengaruh informasi kesetaraan gender dalam Swara terhadap persepsi pembaca. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa Swara mampu membentuk opini publik melalui seleksi isu dan penekanan tema, memperkuat posisi media sebagai agenda setter dalam diskursus gender.

Penelitian lain oleh Fadjarini Sulistyowati (2010) mengkaji bagaimana Kompas, melalui konstruksi pemberitaan, menyikapi kebijakan afirmatif bagi calon legislatif perempuan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009. Dengan menggunakan pendekatan *framing*, jurnal ini menunjukkan bagaimana Kompas mengambil posisi mendukung kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan prinsip objektivitas jurnalistik. Ini memperkuat gagasan bahwa Swara merupakan bagian dari arah editorial Kompas yang berupaya mendorong transformasi sosial-politik yang lebih inklusif.

Kajian biografis terhadap tokoh kunci di balik Swara, yakni Maria Hartaningsih, dilakukan oleh Rajab Ritonga dan rekan-rekan. Melalui analisis terhadap karya-karya jurnalistiknya, studi ini menelusuri perkembangan kesadaran gender Maria Hartaningsih dan kontribusinya dalam memperkuat ruang jurnanisme advokasi di tubuh Kompas. Pengalaman lapangan, keterlibatan dalam peliputan isu-isu perempuan, dan jejaring wacana feminis turut membentuk sensitivitas gender yang kuat dalam setiap narasi yang ia bangun.

Sebagai referensi konseptual tambahan, kajian ini juga menggunakan buku Sosiologi Gender karya Ikhlasih Dalimoenthe (2021) untuk menjelaskan berbagai bentuk ketidakadilan gender dan bagaimana struktur sosial turut memperkuat relasi kuasa yang timpang dalam sejarah panjang relasi gender di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan empat tahapan utama yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik atau pengumpulan sumber dilakukan melalui penelusuran arsip dan dokumen relevan. Sumber primer terdiri dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dan artikel-artikel pada Rubrik Swara dalam Harian Kompas edisi 1999–2011, yang diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Timur. Sumber sekunder meliputi buku Sosiologi Gender karya Dr. Ikhlasih Dalimoenthe serta buku internal Kompas Menulis dari Dalam sebagai referensi kontekstual.

Kritik sumber dilakukan secara internal untuk menilai keabsahan dan konsistensi isi dokumen dan artikel. Fokus analisis diarahkan pada keterkaitan antara isi Rubrik Swara dengan prinsip keadilan gender, dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Evaluasi ini mencakup verifikasi fakta, konsistensi informasi, serta relevansi sumber terhadap kerangka teori yang digunakan.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data yang telah melalui kritik sumber. Peneliti

¹⁴ Sri Hadijah Arnus. 2015. Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. Al-Munzir, vol. 8, no. 1, hal. 105.

¹⁵ St. Sularito. 2007. Kompas Menulis dari Dalam. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara, hal. 195.

menggunakan pendekatan teori sosiologi gender dan komunikasi massa untuk menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan menjadi sebuah narasi sejarah yang merefleksikan konstruksi keadilan gender dalam Rubrik Swara. Hasil interpretasi kemudian disusun menjadi tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul "Suara Keadilan Gender dalam Rubrik Swara Harian Kompas Tahun 1999–2011" yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pemikiran yang Mendasari Harian Harian Kompas Dan Rubrik Swara

1. Sejarah Pemikiran yang Mendasari Harian

Sejarah pemikiran yang mendasari berdirinya Harian Kompas tidak terlepas dari ide-ide sosialisme-demokrat yang berkembang di Indonesia pasca-kemerdekaan, yang dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa itu. Pemikiran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pergolakan politik Indonesia, gerakan sosialisme di Indonesia, hingga pengalaman pribadi tokoh-tokoh intelektual yang kelak menjadi pendiri Kompas, seperti Frans Seda, P. K. Ojong, dan Jakob Oetama.

Pemikiran ini dapat dilacak kembali ke ideologi sosialisme-demokrat yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Frans Seda, yang mendirikan kelompok Bentara Rakyat Society. Kelompok ini kemudian menjadi cikal bakal Harian Kompas. Dalam tulisan Frans Seda pada tahun 1990, ia mengungkapkan pengaruh Fabian Society, kelompok sayap kiri di Inggris yang memperkenalkan ideologi sosialisme dengan pendekatan bertahap. Fabian Society menolak doktrin revolusioner dari komunisme dan lebih mendukung transisi menuju masyarakat sosialis secara bertahap dan moderat.¹⁶ Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan ideologi media yang kelak berdiri sebagai Kompas.

Frans Seda bersama P. K. Ojong dan Jakob Oetama melihat pentingnya media sebagai alat untuk menyuarakan kepentingan publik tanpa terikat oleh kepentingan politik tertentu. Pendirian Harian Kompas merupakan respons terhadap dominasi media yang lebih sering terafiliasi dengan partai politik tertentu pada masa itu, dan menjadi wadah bagi dialog yang mencerminkan keragaman dan pluralitas masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap ideologi sosialisme yang lebih moderat, yang lebih mengutamakan pengelolaan ekonomi secara profesional dan mendukung demokrasi yang inklusif.

P. K. Ojong dan Jakob Oetama, yang memiliki pengalaman panjang di dunia jurnalistik, ingin agar Harian Kompas menjadi media yang berfungsi sebagai suara bagi masyarakat, sekaligus menjadi penunjuk arah bagi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Kedua tokoh ini menentang dominasi media yang

dikendalikan oleh partai politik tertentu, dan lebih memilih untuk menjalankan media yang independen, jujur, dan tidak memihak. Mereka berpendapat bahwa media seharusnya memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang berimbang, yang memungkinkan masyarakat untuk berpikir secara kritis tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik yang sempit.

Pemikiran ini semakin diperkuat dengan pendirian Yayasan Bentara Rakyat pada tahun 1965, yang menjadi payung dari penerbitan Harian Kompas. Yayasan ini didirikan dengan tujuan untuk menjaga kebebasan dan independensi dalam penyelenggaraan media, sekaligus mengakomodasi nilai-nilai pluralisme. Nama "Kompas," yang diberikan oleh Presiden Soekarno, mencerminkan peran media ini sebagai penunjuk arah, yang akan membantu masyarakat Indonesia mengarungi berbagai tantangan politik dan sosial pada masa itu.

Pendirian Harian Kompas juga tidak lepas dari kondisi politik Indonesia yang tidak menentu pada saat itu. Setelah pembredelan beberapa media, P. K. Ojong dan Jakob Oetama, yang sebelumnya terlibat dalam media seperti Keng Po dan Star Weekly, memutuskan untuk mendirikan Harian Kompas sebagai langkah perlawanan terhadap pembredelan media yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka ingin menciptakan sebuah media yang tidak hanya menyediakan berita, tetapi juga menjadi ruang bagi perbedaan pendapat, di mana masyarakat dapat berdialog dan bertukar pandangan tanpa adanya tekanan dari kelompok atau kekuasaan tertentu.

Seiring berjalannya waktu, Harian Kompas berkembang menjadi media yang mengedepankan prinsip-prinsip humanisme, pluralisme, dan independensi. Kompas tidak hanya mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ruang diskusi publik yang konstruktif. Terlepas dari tantangan politik yang dihadapi, Harian Kompas tetap bertahan dan terus beradaptasi dengan dinamika sosial-politik di Indonesia.

Pemikiran yang mendasari Harian Kompas, yang memadukan ideologi sosialisme-demokrat moderat, semangat independensi media, serta komitmen terhadap pluralisme dan keberagaman, menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan dan perkembangan media ini. Harian Kompas tidak hanya menjadi media massa, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga keberagaman opini dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

2. Pemikiran yang Mendasari Rubrik Swara.

Rubrik Swara di Harian Kompas bukan sekadar terbitan khusus untuk perempuan; ia lahir dari keresahan mendalam Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana, dua jurnalis perempuan yang bertekad untuk memecah kebuntuan dalam pemberitaan yang ada. Berawal dari latar belakang pendidikan keduanya di bidang Kajian Studi Perempuan dari Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Swara dirancang sebagai sebuah ruang untuk

¹⁶ Edward R. Pease 1916. *The History of the Fabian Society*. New York. E.P. Dutton & Company Publishers, bab 3.

menyuarakan pandangan dan pengalaman perempuan, terutama yang selama ini terabaikan dalam arus utama media konvensional.

Pemikiran yang mendasari Swara terlahir dari kesadaran kritis terhadap ketidakmampuan jurnalistik *mainstream* dalam mengangkat isu-isu perempuan secara substansial. Ketika Maria Hartiningsih pulang dari studi di Amerika Serikat pada tahun 1998, semangat kesetaraan gender yang ia bawa kembali ke tanah airnya begitu membara. Ia bertekad untuk mendorong perubahan melalui tulisan-tulisannya di Harian Kompas. Dalam sebuah diskusi di ruang redaksi Kompas, Roesilah Kasijanto, Pemimpin Perusahaan Kompas pada saat itu, mendorong untuk membuat terbitan khusus yang mengangkat suara perempuan. August Parengkuan, Wakil Pemimpin Redaksi, kemudian menunjuk Ninuk Mardiana Pambudy untuk merancang konsep rubrik tersebut. Bersama-sama, Maria dan Ninuk melihat bahwa jurnalistik konvensional tidak mampu menjawab pertanyaan mendalam yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama yang menyangkut pengalaman perempuan.

Fenomena gerakan sosial perempuan yang diprakarsai oleh kelompok "Suara Ibu Peduli" pada tahun 1998 memberikan kesadaran penting bagi keduanya. Kelompok ini menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga susu, sebuah masalah yang langsung berdampak pada kehidupan perempuan, terutama ibu rumah tangga yang memikul tanggung jawab pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak.¹⁷ Meskipun gerakan ini mendapat perhatian media, banyak jurnalis yang gagal memahami substansi yang lebih mendalam dari aksi tersebut. Maria dan Ninuk merasa bahwa pemberitaan yang ada hanya berfokus pada isu permukaan, yaitu harga susu, tanpa mengaitkan masalah tersebut dengan kebijakan publik yang lebih luas dan dampaknya pada kesejahteraan perempuan. Inilah titik balik bagi mereka untuk menciptakan sebuah ruang bagi perempuan untuk mengungkapkan pengalaman hidup mereka, yang selama ini sering terpinggirkan.

Kesadaran ini semakin menguat ketika mereka menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa penting di tahun 1998, seperti tragedi Trisakti dan Semanggi, lebih banyak menyoroti korban laki-laki dan aksi mahasiswa, sementara kontribusi perempuan, baik dalam memberikan bantuan maupun menjadi korban kekerasan seksual, hampir tak mendapat sorotan yang memadai. Selain itu, keberadaan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang lahir pada 9 Oktober 1998, meskipun penting, tetap tidak memperoleh perhatian yang layak dari media massa pada umumnya. Maria dan Ninuk menilai bahwa fenomena-fenomena semacam ini membutuhkan pemaknaan yang lebih dalam dan lebih mendalam, yang tidak hanya melihat perempuan sebagai

objek berita, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam membentuk narasi sosial-politik.

Instabilitas kondisi sosial dan politik Indonesia yang sedang bergulir dari Orde Baru menuju reformasi, Harian Kompas sadar akan pentingnya mengakomodasi pembaca perempuan yang selama ini terabaikan. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa proporsi pembaca perempuan lebih kecil dibandingkan pembaca laki-laki, yang menjadi alasan utama manajemen Kompas untuk meluncurkan terbitan khusus perempuan. Dalam konteks ini, Swara bukan hanya sebuah terbitan yang berbicara tentang peran praktis perempuan, tetapi juga tentang bagaimana perempuan seharusnya diakomodasi dalam struktur sosial yang lebih luas, termasuk dalam arena politik dan ekonomi.

Mengadopsi visi humanisme transendental, Swara hadir dengan tujuan untuk mengangkat isu-isu perempuan dari sudut pandang yang lebih strategis dan kritis. Terbit pertama kali pada 6 Mei 1999, Swara mengangkat berbagai isu yang menggugah, dari pemilu, seks sinetron yang eksploitatif terhadap perempuan, hingga dampak sosial dari kebijakan politik terhadap kehidupan perempuan. Pendekatan yang digunakan oleh Swara adalah feminisme gelombang kedua, dengan mengusung slogan "yang personal adalah politis." Dengan perspektif ini, Swara mencoba mengaitkan masalah-masalah pribadi yang dihadapi perempuan dengan kebijakan publik yang lebih besar, seperti kemiskinan, biaya hidup yang tinggi, dan ketimpangan sosial yang menekan kehidupan mereka.

Perjalanan mendirikan Swara tidaklah mulus. Masyarakat Indonesia, yang saat itu masih sangat terikat pada norma-norma patriarkis, kesulitan menerima gagasan baru tentang gender dan feminisme. Pemahaman tentang feminisme seringkali dicap sebagai sesuatu yang radikal, dengan stereotip negatif yang melekat pada perempuan yang mengkritisi ketidakadilan gender. Walaupun Swara menjadi terbitan yang sangat penting, biaya produksinya yang tinggi dan kurangnya daya tarik komersial membuat suplemen ini hanya bertahan selama kurang dari setahun. Swara hanya terbit sebanyak 65 edisi, sebelum akhirnya dihentikan pada 30 Desember 1999.

Swara meskipun dihentikan, semangat yang melatarbelakanginya tidak pernah padam. Berkat perjuangan tanpa lelah Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana, Swara akhirnya dapat hadir kembali, kali ini dalam bentuk yang lebih terintegrasi dalam lembar utama Harian Kompas. Meskipun kuantitas kolomnya lebih sedikit dibandingkan suplemen sebelumnya, kehadiran Swara dalam halaman utama ini memberikan simbolisme kuat bahwa isu perempuan dan gender tidak lagi dianggap sebagai masalah marjinal, tetapi sudah menjadi bagian dari arus utama pemberitaan. Ini merupakan langkah besar menuju pengakuan penuh terhadap kesetaraan gender dalam ruang publik Indonesia.

¹⁷ Karlina Supelli. 1998. Suara Ibu Peduli dalam Pledoi, diakses dari Jurnal Perempuan.

https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/pledoid_karlina_leksono.pdf

Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana dalam sejarah perjalanan Swara, berhasil memperkenalkan perspektif gender yang lebih humanis dan multikultural. Mereka tidak hanya berbicara tentang kesulitan perempuan dalam menjalankan peran ganda di rumah tangga, tetapi juga tentang bagaimana kedua gender, laki-laki dan perempuan harus saling menghargai dan berkolaborasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Swara menjadi wadah bagi mereka untuk memperjuangkan pandangan feminis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar polarisasi antara laki-laki dan perempuan. Lewat Swara, mereka berusaha menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pengalaman perempuan sangat strategis dan menjadi sumber penting dalam memahami dinamika sosial-politik yang lebih luas.

B. Analisis Pesan Feminisme Dalam Rubrik Swara Harian Kompas

Media massa, sebagai saluran komunikasi utama, berfungsi menyampaikan pesan, informasi, dan hiburan kepada publik. Media seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform digital memiliki peran besar dalam produksi dan distribusi wacana publik, yang mencakup berita, opini, hiburan, dan iklan. Wacana, dalam kajian sosial, merupakan praktik komunikasi yang membentuk dan mereproduksi makna dalam masyarakat, mencerminkan kekuasaan, ideologi, dan hubungan sosial yang ada.

Media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga membingkai peristiwa dengan perspektif tertentu, memengaruhi cara publik memahami isu-isu sosial seperti politik, ekonomi, budaya, dan gender. Sebagai alat produksi wacana, media sering menjadi medan pertarungan antara wacana dominan dan kontra-wacana.

Swara, sebagai bagian dari Harian Kompas, terbit bersamaan dengan era reformasi sebagai respons terhadap ketimpangan gender yang terjadi di media masa Orde Baru. Sejak awal terbit, Swara secara konsisten mengangkat isu kesetaraan gender dan menegaskan posisinya sebagai media perempuan. Artikel-artikel yang dimuat di rubrik ini tak lepas dari perspektif wartawan dan tim editorial yang kental dengan ideologi penulisnya.

Model AWK relevan untuk memahami bagaimana pesan ideologis dalam rubrik Swara membentuk atau memperkuat pandangan sosial, politik, dan ekonomi, terutama terkait isu-isu buruh migran dan ketidakadilan sosial yang mereka hadapi. Dengan demikian, analisis ini akan memberikan wawasan tentang peran media, khususnya Swara, dalam mempengaruhi opini publik dan menantang ideologi dominan di masyarakat pada masa itu.

1. Gerakan Feminisme di Indonesia

Gerakan feminisme di Indonesia memiliki sejarah panjang yang tak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Secara umum, dinamika gerakan ini dapat dibagi ke dalam tiga fase utama: masa kolonial, Orde Baru, dan pasca-Reformasi. Setiap fase memiliki corak perjuangan yang khas, dengan tantangan serta peluang yang berbeda-beda.

Embrio feminisme Indonesia pada masa kolonial, muncul dalam wujud perjuangan emansipasi perempuan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, dan Rohana Kudus. Meskipun istilah "feminisme" belum populer saat itu, semangat kesetaraan gender telah hadir melalui gagasan dan tindakan mereka, khususnya dalam memperjuangkan akses perempuan terhadap pendidikan. Kartini, misalnya, melalui surat-suratnya yang kemudian dibukukan menjadi *Habis Gelap Terbitlah Terang*, mengkritik keras sistem sosial-feodal Jawa yang mengekang kebebasan perempuan, serta mendukung pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan sebagai jalan menuju kemajuan bangsa. Di Hindia Belanda, beberapa organisasi perempuan mulai muncul pada awal abad ke-20, seperti Poetri Mardika dan Putri Indonesia, yang berupaya mengorganisasi perempuan dalam konteks pergerakan nasional. Meskipun masih didominasi oleh kelas menengah dan elit terdidik, gerakan perempuan ini memainkan peran penting dalam memperluas kesadaran akan hak-hak perempuan di tengah kolonialisme dan patriarki.

Memasuki era Orde Baru (1966–1998), gerakan feminisme dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks. Pemerintahan militeristik di bawah Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan. Negara membakukan peran perempuan melalui ideologi "kodrat wanita" yang dipopulerkan dalam program-program seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Perempuan didefinisikan utamanya sebagai istri, ibu rumah tangga, dan pendukung tugas suami, terutama di kalangan birokrasi dan militer. Gerakan perempuan mengalami depolitisasi, dan organisasi-organisasi perempuan independen dibubarkan atau dilebur ke dalam wadah tunggal yang dikontrol negara. Pengalaman traumatis pembubaran Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S dan kemudian dihancurkan secara brutal oleh rezim Orde Baru, menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana negara dapat memanipulasi wacana gender untuk kepentingan politik dan represi. Dalam konteks ini, feminisme tidak hanya dibungkam tetapi juga dicurigai sebagai ancaman terhadap stabilitas dan nilai-nilai keluarga Indonesia.

Menghadapi represi tersebut, sejumlah akademisi dan aktivis feminis mulai mengembangkan diskursus alternatif yang lebih kritis terhadap struktur patriarki dan negara. Beberapa perempuan seperti Julia Suryakusuma, Gadis Arivia, dan Saparinah Sadli menulis dan berbicara secara terbuka mengenai subordinasi perempuan, baik di dalam keluarga, negara, maupun dunia kerja. Meskipun ruang gerak mereka terbatas, mereka meletakkan dasar intelektual bagi kebangkitan feminisme di era berikutnya.

Pasca-Reformasi, gerakan feminisme di Indonesia mengalami kebangkitan yang signifikan. Jatuhnya Orde Baru membuka ruang publik yang lebih bebas, memungkinkan munculnya berbagai organisasi perempuan yang memperjuangkan isu-isu kesetaraan

gender, kekerasan terhadap perempuan, serta hak-hak reproduksi. Lahirnya Komnas Perempuan pada 1998 merupakan tonggak penting yang menandai pengakuan negara terhadap perlunya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Aktivisme perempuan berkembang ke berbagai sektor, dari akar rumput hingga ranah akademik dan hukum. Advokasi terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (yang kemudian disahkan sebagai UU TPKS pada 2022), serta perjuangan menentang diskriminasi berbasis gender dan seksualitas, menjadi contoh konkret dari konsolidasi gerakan feminis kontemporer.

Meski demikian, gerakan feminisme pasca-Reformasi juga menghadapi tantangan baru. Isu-isu seperti LGBT, pluralisme agama, dan seksualitas menjadi medan kontestasi yang tajam, baik di ruang publik maupun kebijakan negara. Feminisme seringkali disalahpahami atau bahkan dituduh sebagai produk Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau agama. Stigma ini memperlihatkan betapa pentingnya artikulasi feminisme yang kontekstual yang tidak hanya mengadopsi wacana global, tetapi juga berakar pada pengalaman perempuan Indonesia yang majemuk. Sejumlah akademisi dan aktivis feminis Indonesia seperti Saras Dewi, Lies Marcoes, dan Yeni Rosa Damayanti mencoba membangun pendekatan feminis yang interseksional, pluralistik, dan kontekstual, dengan menggali tradisi lokal, agama, dan hukum adat dalam kerangka hak asasi manusia dan keadilan gender.

Sejarah feminisme di Indonesia dengan demikian bukanlah cerita linear, melainkan medan dialektika antara resistensi dan represi, antara lokal dan global, antara tradisi dan pembaruan. Gerakan ini terus berkembang, tidak hanya sebagai proyek kesetaraan gender, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan demokrasi, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap kemanusiaan yang utuh bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

2. Pesan Feminisme dalam Swara

Ideologi sebagai kumpulan gagasan yang membentuk cara pandang terhadap realitas sosial, politik, dan ekonomi, menjadi elemen penting dalam pembentukan wacana media. Dalam konteks ini, rubrik Swara Harian Kompas menjadi ruang artikulasi ideologis yang khas, khususnya terkait feminisme. Sebagai rubrik yang memposisikan diri sebagai media perempuan progresif, Swara tidak hanya menyuarakan pemberdayaan perempuan, tetapi juga menyisipkan pesan-pesan feminis dalam pilihan isu, bahasa, dan gaya penyampaian.

Feminisme sendiri merupakan gerakan dan ideologi yang menuntut kesetaraan gender di semua aspek kehidupan. Ia muncul sebagai respons terhadap ketimpangan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik dalam ranah domestik maupun publik. Dalam masyarakat patriarkal, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sering dijadikan dasar untuk membakukan peran sosial yang timpang. Feminisme berupaya merombak struktur

nilai ini, menggantinya dengan relasi yang lebih adil dan setara.

Rubrik Swara merefleksikan semangat tersebut dalam berbagai artikelnya. Kehadiran dua tokoh kunci, Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy wartawan senior dengan latar belakang studi perempuan berperan besar dalam membentuk orientasi rubrik ini. Walaupun memberi ruang bagi penulis dari luar Kompas, tulisan-tulisan yang dimuat tetap berpijak pada perspektif feminis. Pesan-pesan ideologis dalam Swara disampaikan secara implisit: melalui pilihan tema, judul, hingga diksi yang digunakan, tanpa harus menyebut "feminisme" secara langsung.

Salah satu contoh artikulasi ideologi feminisme dalam Swara terlihat dalam artikel berjudul "Menggemakan Konferensi Durban untuk Menolak Diskriminasi" (24 September 2001). Meskipun Konferensi Durban secara umum membahas isu rasial, Swara berhasil menggeser fokus menjadi persoalan gender dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas gagasan yang pertama kali diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw pada 1989. Pendekatan ini menyoroti bahwa perempuan, khususnya dari kelompok rentan, kerap mengalami diskriminasi berlapis, seperti rasial dan gender secara bersamaan.

Swara dalam artikelnya, mengkritisi minimnya perhatian terhadap isu gender dalam konferensi tersebut. Dengan merujuk pada kerangka hukum internasional seperti ICERD dan The Beijing Platform for Action, teks ini menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan bagian dari ketidakadilan sistemik yang harus dilawan. Penggunaan istilah seperti misogini, xenophobia, dan diskriminasi rasial memperlihatkan kesadaran kritis terhadap kompleksitas persoalan sosial yang dihadapi perempuan.

Lebih jauh, artikel ini menggambarkan perempuan bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai agen perubahan. Dengan demikian, Swara menampilkan ideologi feminisme yang tidak hanya mengungkap realitas ketimpangan, tetapi juga menawarkan resistensi dan harapan akan transformasi sosial.

C. Muatan Keadilan Gender Dalam Rubrik Swara Harian Kompas 1999-2011

Pemberitaan tentang perempuan dalam media pada masa Orde Baru sangat dibatasi oleh doktrin State Ibuism, sebuah ideologi negara yang menempatkan perempuan sebagai pendukung laki-laki di ranah domestik. Peran ideal perempuan digambarkan dalam kerangka ibu dan istri yang patuh, tanpa hak untuk mengakses kekuasaan atau pengakuan publik. Dalam lanskap media, hal ini tercermin dalam berita-berita yang hanya menampilkan perempuan dalam konteks seremonial, seperti kegiatan PKK, Dharma Wanita, atau peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu. Wartawan pun cenderung menyerap pandangan ini, sehingga isu-isu perempuan hanya tampil secara simbolik dan dangkal.

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 dan dicabutnya aturan SIUPP menjadi titik balik penting dalam sejarah pers Indonesia. Era reformasi membuka ruang kebebasan pers yang memungkinkan jurnalis

mengeksplorasi isu-isu perempuan dan gender secara lebih terbuka dan kritis. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak media tetap mengemas isu perempuan sebagai bacaan ringan, terbatas pada topik domestik seperti fesyen, masakan, atau kecantikan. Isu gender jarang dikaitkan dengan politik, hukum, dan kebijakan publik, menandakan masih kuatnya marginalisasi topik ini dalam struktur media arus utama.

Rubrik Swara hadir pada tahun pertama reformasi, tepatnya 1999, sebagai bagian dari transformasi Kompas menuju media yang berperspektif gender. Rubrik ini tidak sekadar menampilkan isu perempuan, tetapi juga membongkar struktur ketimpangan gender melalui pendekatan yang kritis dan edukatif. Di bawah arahan dua wartawan senior, Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy, Swara mengangkat tema-tema penting yang selama Orde Baru terpinggirkan dari ruang publik.

Sebagai rubrik non-berita, Swara memiliki otonomi editorial yang relatif tinggi. Pemilihan tema dilakukan melalui diskusi informal, dan siapa pun dapat menyumbang tulisan selama memiliki kesadaran terhadap keadilan gender. Konsep ini memungkinkan keterlibatan luas dari berbagai kalangan seperti akademisi, aktivis, politisi, hingga ibu rumah tangga dalam produksi wacana media yang lebih inklusif dan kritis. Dari 1999 hingga 2011, Swara secara konsisten menjadi ruang alternatif yang menyuarakan persoalan perempuan dengan pendekatan progresif dan kontekstual, mencerminkan perubahan besar dalam relasi antara media, negara, dan masyarakat sipil pasca-Orde Baru.

1. Muatan Keadilan Gender dalam Rubrik Swara Tahun 1999-2000

Transisi dari Orde Baru ke Reformasi tahun 1998 membuka ruang baru bagi pergerakan perempuan di Indonesia. Meskipun berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan saat itu masih tenggelam di tengah gejolak politik, semangat demokratisasi memberi harapan bagi munculnya wacana-wacana baru tentang kesetaraan gender. Dalam konteks inilah Rubrik Swara hadir pada 1999 sebagai upaya awal Kompas membangun media yang sensitif gender.

Swara pada tahun pertamanya, masih terbit dalam format suplemen tambahan dengan ukuran lebih kecil dari halaman utama. Rubrik ini dipimpin oleh dua jurnalis berpengalaman dalam kajian perempuan, Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy. Meski begitu, mereka tidak serta merta bisa menyuarakan gagasan feminisme secara frontal, mengingat masih kuatnya warisan ideologis Orde Baru yang memarginalkan peran publik perempuan dan menstigma feminisme sebagai ide asing dan negatif. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Swara menggunakan strategi dekonstruksi wacana dan membongkar asumsi

dasar yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan.

Salah satu bentuk dekonstruksi terlihat pada edisi 20 Mei 1999. Melalui teks I “Perempuan dalam Sinetron, Cermin Bersama”, Swara mengkritik penokohan perempuan dalam sinetron-sinetron populer yang sarat stereotip dan tidak relevan dengan realitas sosial-politik saat itu.

Umumnya sinetron tersebut selalu mengambil perempuan sebagai tokoh utama, yang terlibat drama percintaan yang berbelit kusut, selalu ada air mata yang tumpah, selalu ada kemarahan dan digambarkan sebagai anak, istri, ibu atau kekasih, tanpa peran publik yang jelas. Sinetron-sinetron dengan rating tertinggi itu semua imun terhadap perkembangan dahsyat yang terjadi di Indonesia. Nyaris tidak ada yang mengambil tema utama, atau paling tidak sebagai latar belakang cerita, gerakan reformasi, krisis ekonomi atau perubahan keadaan yang cepat yang terjadi saat ini.¹⁸

Artikel lanjutan seperti “Pasrah, Materialis, Tega, Cuma Tempelan” membedah representasi perempuan dalam sinetron Tersanjung, Di Antara Dua Pilihan, dan Permataku, yang menampilkan perempuan sebagai sosok lemah, antagonis, atau objek semata. Kritik ini menyoroti bagaimana sinetron mengindoktrinasi perempuan untuk saling berkonflik dan tetap terpinggirkan dalam kehidupan publik.

Rubrik ini juga menggambarkan bagaimana struktur industri televisi turut melanggengkan konstruksi gender yang timpang. Tokoh-tokoh seperti Marselli Sumarno dan Raam Punjabi memberi perspektif berbeda: antara tuntutan pasar dan tanggung jawab produser.¹⁹ Dalam artikel yang sama, Aisjah Amini dari PPP menegaskan perlunya membentuk citra perempuan sebagai subjek aktif dalam media. Gagasan ini mencerminkan semangat Reformasi yang mendorong perubahan struktural, termasuk dalam industri hiburan.

Melalui analisis tiga artikel tersebut, tampak bahwa Rubrik Swara mengambil posisi sebagai agen dekonstruksi media populer. Ia tidak hanya mengkritik isi sinetron, tetapi juga mendorong pembacanya untuk bersikap kritis terhadap budaya visual yang membentuk kesadaran gender. Meski akhirnya dihentikan sementara pada akhir Desember 1999 karena kendala biaya produksi, Swara telah mencatatkan jejak penting sebagai ruang wacana yang mendorong keadilan gender di tengah transisi demokrasi.

2. Muatan Keadilan Gender dalam Rubrik Swara tahun 2000-2004

Periode 1999–2004 menjadi masa transisi penting dalam sejarah Indonesia pasca-Reformasi. Pemilihan

¹⁸ Ninuk Mardiana Pambudy. Perempuan dalam Sinetron, Cermin Bersama, Swara. Harian Kompas, 20 Mei 1999.

¹⁹ Ninuk Mardiana Pambudy. Sinetron Drama dan Pemirsas Pasif. Kompas, Swara. Harian Kompas. 20 Mei 1999, hal. 3.

langsung Abdurrahman Wahid sebagai presiden menandai demokratisasi politik, namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat sebelum dimakzulkan pada 23 Juli 2001. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, media perempuan Swara mengambil jalur berbeda: alih-alih terjebak dalam arus pemberitaan pemakzulan, Swara justru mengarahkan sorotannya pada implementasi kebijakan otonomi daerah dan pengarusutamaan gender.

Otonomi daerah sendiri bukanlah konsep baru. Sejak 1945, kebijakan ini mengalami pasang surut: dari semangat desentralisasi dalam UU No. 1/1945, menuju sentralisasi dalam masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (UU No. 5/1974), hingga desentralisasi radikal pasca-Reformasi melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Namun, desentralisasi ini membuka ruang lahirnya kebijakan lokal yang tidak selalu berpihak pada nilai-nilai kesetaraan dan hak asasi manusia.

Presiden Abdurrahman Wahid pada saat yang sama, menerbitkan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun, pelaksanaannya di tingkat daerah terbukti problematik. Swara, yang sejak awal berkomitmen pada isu perempuan, mengambil peran sebagai watchdog dalam memantau jalannya otonomi daerah, terutama dampaknya terhadap hak-hak perempuan.

Mengangkat laporan-laporan investigatif dari Aceh, Sumatera Barat, Garut, hingga Papua, Swara menampilkan bagaimana kebijakan lokal berbasis adat dan tafsir agama seringkali membatasi ruang gerak perempuan. Salah satu kasus mencolok adalah kisah Alifah dari Garut, seorang perempuan berhijab yang dirazia dan digunduli karena dianggap melanggar Perda jam malam.²⁰ Kasus ini menjadi simbol bagaimana tubuh perempuan menjadi objek kontrol atas nama moralitas.

Swara tidak berhenti pada pelaporan. Media ini menggandeng tokoh-tokoh intelektual seperti Musdah Mulia, Alwi Shihab, dan Budi Munawar Rahman untuk mengajukan narasi tandingan. Mereka menekankan bahwa tafsir agama seharusnya kontekstual dan progresif, bukan represif. Dalam liputannya, Swara mendorong reinterpretasi terhadap syariat Islam, kesadaran akan keragaman, serta perlunya kebijakan publik yang memprioritaskan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

Swara juga mengapresiasi capaian seperti dibatalkannya pasal diskriminatif dalam Raperda Anti-Maksiat Sumatera Barat (Edisi 6 Mei 2002), sekaligus mengkritisi kebijakan serupa di Sukabumi dan Cianjur yang mewajibkan perempuan berkerudung. Dalam konteks Papua, artikel "Otonomi Khusus Memberi Peluang Perempuan Papua untuk Maju" (Edisi 20 Mei 2002) mengulas keterbatasan representasi perempuan dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mendesak

inklusi perempuan dalam struktur pengambilan kebijakan.

Swara tampil bukan hanya sebagai media, melainkan agen perubahan dengan gaya jurnalistik yang tajam namun solutif Ia menyuarakan keadilan gender dalam lanskap baru otonomi daerah, memposisikan dirinya sebagai pelaku historis yang membangun kesadaran kolektif demi Indonesia yang lebih demokratis dan setara gender.

3. Muatan Keadilan Gender dalam Rubrik Swara tahun 2004-2009

Rubrik Swara dalam rentang waktu 2004 hingga 2009, hadir sebagai media alternatif yang mencerminkan dinamika sosial-politik pasca-Reformasi, terutama dalam mengawal isu-isu keadilan gender dan partisipasi politik perempuan. Sebagai platform yang dikelola oleh jurnalis, akademisi, dan aktivis perempuan, Swara tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga aktif membentuk opini publik, menjadi ruang artikulasi bagi suara-suara marjinal, dan mendorong reformasi struktural yang berpihak pada kesetaraan.

Fokus utama Swara dalam periode ini adalah peningkatan partisipasi politik perempuan. Isu ini menjadi sorotan seiring pelaksanaan Pemilu 2004 yang menjadi ujian awal demokrasi multipartai pasca-Orde Baru. Artikel "Belajar dari Pemilu 2004" menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yang hanya mencapai 11,09% yang jauh dari target afirmatif 30%.²¹ Swara membingkai masalah ini bukan sebagai kegagalan individu, tetapi sebagai konsekuensi dari struktur politik yang eksklusif, termasuk budaya patriarki, sistem daftar terbuka, dan lemahnya komitmen partai terhadap regulasi afirmatif.

Kritik moral yang tajam diarahkan pada partai-partai politik yang tidak serius menjalankan amanat UU Pemilu. Swara menyuarakan pentingnya reformasi struktural melalui penegakan kuota gender, pendidikan politik bagi perempuan, dan pembentukan solidaritas lintas partai dalam bentuk Kaukus Perempuan Parlemen, yang menjadi kenyataan pada 2006.

Edisi 25 Oktober 2004 mengangkat tajuk "Perempuan Memandang Pemerintahan Baru" sebagai respons terhadap pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kritik diarahkan pada minimnya perempuan dalam kabinet, lemahnya komitmen terhadap isu tenaga kerja perempuan, serta pernyataan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Swara membingkai kegagalan ini sebagai cerminan konservatisme dalam pengambilan kebijakan dan abainya negara terhadap prinsip pluralisme dan kesetaraan.

Artikel lain, "Pembelajaran Politik di Akar Rumpuk," menolak tuduhan bahwa afirmasi gender adalah jalan pintas. Sebaliknya, ditunjukkan bahwa pengorganisasian perempuan adat, petani, dan nelayan

²⁰ Ninuk Mardiana Pambudy. Peluang Menuju Masyarakat yang Demokratis pada Era Otonomi Daerah, Swara. Harian Kompas. 6 Mei 2002.

²¹ Ninuk Mardiana Pambudy. Belajar dari Pemilu 2004, Swara. Harian Kompas, 9 Agustus 2004.

melalui koperasi dan pelatihan politik membentuk basis partisipasi dari bawah. Suara membantah tuduhan itu dalam artikel mereka berjudul “Pembelajaran Politik di Akar Rumput-Dan Harapan pada Pemerintah Baru” tanggal 25 Oktober 2004 yang menyoroti bagaimana pengorganisasian perempuan adat di Sulawesi Tengah dan petani/nelayan perempuan di Sumatera Utara (melalui SPPN dan FSPMSU) membentuk basis partisipasi politik dari bawah. Kesadaran politik dibangun melalui koperasi, pelatihan, dan penguatan peran dalam Badan Perwakilan Desa (BPD).²²

Bersamaan dengan itu dinamika internal dalam organisasi keagamaan Muhammadiyah menunjukkan perubahan paradigma melalui Sidang Tanwir Desember 2004 yang membuka peluang kepemimpinan bagi perempuan dalam struktur organisasi. Ini merupakan respon atas stagnasi program-program sayap perempuan Muhammadiyah dan kritik terhadap ketidaksesuaian prinsip egalitarian Ahmad Dahlan dengan praktik internal organisasi.²³

Pentingnya Suara terlihat dalam edisi 20 November 2006 yang memuat pembahasan Kaukus Perempuan Parlemen RI terkait lemahnya kewenangan DPD dan munculnya perda-perda diskriminatif. Di sini, Suara menunjukkan dirinya sebagai media advokasi yang setia pada prinsip keadilan gender, sembari mengarsipkan dinamika perjuangan perempuan dari akar rumput hingga parlemen.²⁴

Selama lima tahun tersebut, Suara menjadi ruang penting bagi artikulasi politik perempuan, tidak hanya mencatat sejarah tetapi turut mempengaruhinya. Melalui pendekatan yang kritis dan progresif, Suara tidak hanya mendokumentasikan perkembangan gerakan perempuan, tetapi juga membentuk narasi tandingan terhadap media arus utama yang kerap bias gender dan elitis. Ia menjadi saksi dan pelaku dalam proses demokratisasi Indonesia yang berupaya lebih inklusif dan setara.

4. Muatan Keadilan Gender dalam Rubrik Suara tahun 2009-2011

Meningkatnya jumlah perempuan Indonesia yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri pada akhir 2000-an tidak lepas dari dampak krisis ekonomi global 2008, yang mempersempit akses kerja domestik terutama bagi perempuan kelas bawah dari daerah tertinggal. Negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan membuka peluang kerja di sektor informal, menjadikan migrasi sebagai pilihan terdesak bagi banyak perempuan.

Rubrik Suara Harian Kompas (2009–2011) memainkan peran penting sebagai media yang tidak hanya melaporkan, tetapi juga membentuk wacana kritis

tentang buruh migran perempuan. Suara secara konsisten mengangkat isu-isu struktural seperti lemahnya perlindungan hukum, praktik perekrutan yang eksploitatif, dan respons negara yang lamban. Dengan diksi seperti “komoditas ekonomi” dan “perempuan jadi korban sistem,” Suara menegaskan posisi redaksi sebagai *watchdog* terhadap ketidakadilan negara dan aktor swasta.

Pemberitaan yang ditampilkan tidak sekadar bersifat informatif, melainkan juga advokatif. Suara menyerukan reformasi UU No. 39/2004, penguatan diplomasi perlindungan buruh migran, serta pentingnya pelatihan dan pengawasan terhadap agen penempatan.²⁵ Media ini menghadirkan ruang diskursif yang menyatukan jurnalisme investigatif dengan kepedulian sosial terhadap keadilan gender.

Tragedi demi tragedi, seperti kematian Sariah binti Taswan di Kuwait (2010) dan eksekusi mati Ruyati di Arab Saudi (2011), menjadi penanda kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional terhadap warga negaranya.²⁶ Suara menyoroti bagaimana negara lebih melayani kepentingan swasta daripada melindungi rakyatnya, serta menggambarkan perempuan buruh migran sebagai subjek politik yang diabaikan, meskipun menyumbang devisa signifikan.

Dalam artikel “Ruyati di antara Isu Kemiskinan dan Korupsi” (24 Juni 2011), Suara menegaskan bahwa akar persoalan buruh migran perempuan terletak pada sistem yang timpang dan kebijakan yang abai. Tragedi Ruyati bukan insiden tunggal, melainkan gejala dari struktur yang membiarkan perempuan miskin menjadi mangsa eksploitasi.

Meski berhenti terbit pada 2011, Suara meninggalkan warisan penting dalam historiografi media Indonesia pasca-Reformasi. Ia menunjukkan bahwa media cetak dapat menjadi agen perubahan sosial yang mendorong akuntabilitas negara dan menyuarakan keadilan bagi kelompok paling rentan. Dalam sejarah perjuangan hak perempuan dan buruh migran, Suara berdiri sebagai saksi sekaligus pelaku dalam pertarungan melawan ketidakadilan struktural.

PENUTUP

Kesimpulan

Harian Kompas sebagai bagian dari sejarah panjang pers nasional, telah berperan penting dalam merekam sekaligus membentuk dinamika sosial-politik Indonesia, termasuk dalam isu-isu keadilan gender. Didirikan pada penghujung Orde Lama dengan semangat sosialisme yang kerap mengkritik ketimpangan, Kompas mengalami berbagai tekanan negara, namun tetap konsisten menyuarakan isu publik. Setelah tumbang

²² Ninuk Mardiana Pambudy. “Pembelajaran Politik di Akar Rumput-Dan Harapan pada Pemerintah Baru”. Harian Kompas. 25 Oktober 2004.

²³ Subhan Mas. “Memberi Kesempatan Perempuan Jadi Pemimpin”, Suara. Harian Kompas. 27 Juni 2005.

²⁴ GKR Hemas. “KPP RI, DPD, dan Isu Perempuan”, Suara. Harian Kompas. 20 November 2006

²⁵ Maria Hartiningsih. “Buruh Migran Tak Ditanggapi Secara Serius”, Suara. Harian Kompas. 29 Oktober 2010, hal. 37.

²⁶ Maria Hartiningsih. “Ruyati di antara Isu Kemiskinan dan Korupsi”, Suara. Harian Kompas. 24 Juni 2011, hal. 37.

Orde Baru, situasi yang lebih terbuka dimanfaatkan Kompas untuk memperluas pelayanannya melalui penerbitan suplemen Swara — sebuah rubrik yang secara khusus ditujukan bagi pembaca perempuan Indonesia.

Swara menjadi medium penting dalam memproduksi dan menyebarkan wacana-wacana kesetaraan gender. Rubrik ini tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi turut berperan sebagai agen ideologis yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu perempuan dan keadilan sosial. Mengangkat tema-tema yang bersentuhan langsung dengan kehidupan perempuan mulai dari diskriminasi, politik, hukum, hingga migrasi tenaga kerja Swara memosisikan diri sebagai ruang diskursif yang progresif dan responsif terhadap isu-isu feminisme kontemporer.

Dalam konteks sejarah feminisme Indonesia, Swara hadir di tengah fase ketiga gerakan feminisme — fase yang ditandai oleh keragaman diskursus dan penguatan organisasi perempuan pasca-Reformasi. Rubrik ini mampu menjembatani pemikiran feminis global dengan realitas lokal melalui bahasa jurnalistik yang edukatif dan analitis.

Berdasarkan periodisasi kontennya dari tahun 1999 hingga 2011, Swara mengalami empat fase perkembangan. Fase pertama (1999–2000) menekankan pembentukan wacana awal dan edukasi publik. Fase kedua (2000–2004) berfokus pada isu-isu otonomi daerah dan dampaknya terhadap perempuan. Fase ketiga (2004–2009) menyuarakan partisipasi perempuan dalam politik. Fase keempat (2009–2011) secara intens mengangkat persoalan perlindungan TKW Indonesia di luar negeri. Tema terakhir ini mencerminkan keberpihakan Swara terhadap perempuan kelas pekerja yang rentan mengalami kekerasan struktural dan pelanggaran hak asasi.

Meskipun Swara berhenti terbit pada 2011, kontribusinya sebagai wahana penyebaran nilai-nilai keadilan gender tetap signifikan. Ia menjadi bagian penting dari upaya media dalam membentuk kesadaran kolektif mengenai perlunya sistem sosial dan kebijakan negara yang lebih adil terhadap perempuan. Dengan demikian, Swara bukan hanya rubrik pelengkap, melainkan representasi komitmen jurnalisme terhadap nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan dalam lanskap media pasca-Orde Baru.

Saran

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan sumber primer berupa Oplah Harian Kompas yang terbit dari 1999–2011. Tidak dipungkiri dalam pengumpulan sumber, peneliti tidak mampu memasukkan semua edisi yang pernah diterbitkan dari tahun 1999–2011 karena keterbatasan akses terhadap sumber. Saran untuk penelitian sejarah dengan tema serupa perlu bekerja sama dengan bidang kearsipan Kelompok Kompas Gramedia agar bisa mengakses semua edisi yang pernah diterbitkan oleh Harian Kompas.

Penelitian kuantitatif juga memungkinkan jika mampu memperoleh edisi yang konsisten dalam hal

periode terbit. Saran kedua, jika memungkinkan perlu dilakukan wawancara kepada Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy sebagai pelaku utama sejarah untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan mungkin tidak dapat diperoleh dari sumber lainnya. Saran ketiga, penelitian seputar teks media cetak dapat dibedah dengan analisis wacana kritis yang menawarkan beberapa model sesuai dengan apa yang ingin diperoleh dalam teks tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Pemerintah Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Republik Indonesia, 1999.

Pemerintah Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Republik Indonesia, 1999.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, Pasal 1 ayat (18) huruf d. Republik Indonesia, 1982.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Republik Indonesia, 1974

B. Kornn

Ama, Kornelis Kewa. 2002. “Otonomi Khusus Memberi Peluang Perempuan Papua untuk Maju”. Dalam Harian Kompas, 20 Mei: 37. Jakarta

Arifin, Nurul. 2008. “Kemenangan Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung”. Dalam Harian Kompas, 17 Maret: 37.

Hartiningsih, Maria, dan Ninuk Mardiana Pambudy. 2004. “Perempuan Memandang Pemerintahan Baru”. Dalam Harian Kompas, 25 Oktober: 42. Jakarta.

Hartiningsih, Maria. 2001. “Tanpa Peran Perempuan, Mana Mungkin....” Dalam Harian Kompas, 3 September: 37. Jakarta.

Hartiningsih, Maria. 2001. “Menggemakan Konferensi Durban untuk Menolak Diskriminasi”. Dalam Harian Kompas, 24 September: 43. Jakarta.

Hartiningsih, Maria. 2011. “Ruyati di antara Isu Kemiskinan dan Korupsi”. Dalam Harian Kompas, 24 Juni: 37. Jakarta.

- Hemas, GKR. 2006. "Perempuan Parlemen KPP RI, DPD, dan Isu Perempuan". Dalam *Harian Kompas*, 20 November: 29. Jakarta.
- Mas, Subhan. 2005 "Memberi Kesempatan Perempuan jadi Pemimpin". Dalam *Harian Kompas*, 27 Juni. Jakarta.
- Muttaqin, Farid. 2008. "Tafsir Feminis yang Lebih Komprehensif". Dalam *Harian Kompas*, 3 Maret: 36. Jakarta.
- Oetama, Jakob. 1980. "Mengantarkan Kepergian PK Ojong". Dalam *Harian Kompas*, 2 Juni. Jakarta.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 1999. "Perempuan dalam Sinetron, Cermin Bersama". *Harian Kompas*, 20 Mei: 1. Jakarta.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 1999. "Pasrah, Materialistis, Tega, Cuma Tempelan". *Harian Kompas*, 20 Mei: 2. Jakarta.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 1999. "Sinetron Drama dan Pemirsa Pasif". Dalam *Harian Kompas*, 20 Mei: 1-13. Jakarta.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2002. "Peluang Menuju Masyarakat yang Demokratis pada Era Otonomi Daerah". Dalam *Harian Kompas*, 6 Mei: 33. Jakarta.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2004 "Belajar dari Pemilu 2004". Dalam *Harian Kompas*, 9 Agustus: 45. Jakarta.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2004. "Kalah dalam Jumlah, Jangan Kalah dalam Kemampuan". Dalam *Harian Kompas*, 9 Agustus: 45. Jakarta.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2004. "Pembelajaran Politik di Akar Rumput-Dan Harapan pada Pemerintah Baru". Dalam *Harian Kompas*, 25 Oktober: 43. Jakarta.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2008. "Tantangan Seksualitas terhadap Demokrasi". Dalam *Harian Kompas*, 31 Maret: 35. Jakarta.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2010. "Buruh Migran Tak Ditanggapi secara Serius". Dalam *Harian Kompas*, 22 Oktober: 38. Jakarta.
- C. Jurnal**
- Aprilianti, Surhaliza, dan Yaya Setiadi. 2022. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2020." *Seminar Nasional Official Statistics*. Vol. 2022 no. 1: hal. 245-254.
- Arfandianto. 2015. "Pers Pancasila Kehidupan Pers Pada Masa Orde Baru (Tahun 1978-Tahun 1993)." *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*. Vol. 3, no. 3: hal. 554-561.
- Arnus, Sri Hadijah. 2015. "Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia." *Al-Munzir*. Vol. 8 no. 1: hal. 103-113.
- Astuti, Tia, dan Stevany Afrizal. 2022. "Realitas Peran dan Hak Perempuan dalam Lingkup Organisasi HMJ di FKIP UNTIRTA (Perspektif Sosiologi Gender)." *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*. Vol. 02 no. 02: hal. 39-50.
- Astuti, Widya, dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih. 2019. "Peranyayaan Annisa Swasti (Yasanti) Dalam perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Gendong Perempuan." *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 3, no. 1: hal. 46-55.
- Brown, Kate, Kathryn Ecclestone, dan Nick Emmel. 2017. "The Many Faces of Vulnerability." *Social Policy and Society*. Vol. 16, no. 3: pp 497-510.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. 2007 "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru." *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 4 no. 1: hal. 59-68.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6 no. 1: hal. 135-149.
- Garg, Arushi. 2020. "Intersectionality and Comparative Anti-Discrimination Law: Missing Links." *International Journal of Constitutional Law*. Vol. 18, no. 2: hal. 637-647.
- Halwati, Umi. 2014. "Membongkar Konstruksi Politik di Media Massa Analisis Wacana terhadap *Harian Kompas* Tahun 2013-2014." *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 15 no. 2: hal. 235-257.
- Kamil, Ibrahim Majdi Mohamad. 2024. ". . From Liberalism to Postmodernism: A Preliminary Study of Philosophical Shifts in Malaysia." *International Journal of World Civilizations and Philosophical Studies*. Vol. 1: hal. 26-41.
- Lesmana, Tjipta. 2005. "Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 2 no. 1: hal. 1-14.
- Marzuki. 2007. "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol. 4 no. 2: hal. 67-77.
- Pelangi, Inne. 2024. "Representasi Ideologi Pada Wacana Konflik Sosial Politik Dalam Teks Media Massa Kajian: Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 2, no. 8: hal. 500-509.
- Prihartono, Rachmat, dan Suharyo. 2022. "Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk dalam "#DebatKeren Papua – Budiman Sudjatmiko VS Dandhy Laksono (Kajian Analisis Wacana Kritis)." *Wicara*. Vol. 1, no. 2: hal. 90-96.
- Salsabila, Dina, dan Muhammad Yunus Hendrawan. 2021 "Analisis Kondisi Pemberdayaan Gender di Indonesia Tahun 2020 dengan Agglomerative Hierarchical Clustering dan Biplot." *Seminar Nasional*

Official Statistics 2021. Vol. 2021, no. 1: hal. 204-213.

Siregar, Ade Kurniawan, dan Eka Fitri Qurniawati. 2022. "Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di Tempo.co." *Journal of New Media and Communication*. Vol. 1 no. 1: hal. 1-15.

Soedarmo, Runalan. 2014. "Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965)." *Jurnal Artefak*. Vol. 2 no. 1: hal. 135.

Supriyadi. 2015. "Analisis Wacana Kritis: Konsep Dan Fungsinya Bagi Masyarakat. hal. ." *Aksara: Jurnal Bahasa dan Sastra*. Vol. 16 no. 2: hal. 96-112.

Syam, Nur. 2010. "Jejak Reformasi dalam Lintasan Sosio-Historis." *General legislative and executive papers*: hal. 1-10.

Wicaksono, Mochamad Arief. 2018. "Mereka Yang Tidak Dibayar Tinggi: Ibuisme, Taman Kanak-kanak, dan Kampung di Indramayu." *Jurnal Etnografi Indonesia*. Vol. 3 no. 2: hal. 121-140.

Wisnujati, Nugrahini Susantinah. 2020. "Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*. Vol. 20 no. 2: hal. 67-81

D. Buku

Dalimoenthe, Ikhlasiah. 2021. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasdi, Aminuddin, Wisnu, dan Rojil Nugroho Bayu Aji. 2018 *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Mallarangeng, Rizal. 2010. *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: PT Gramedia.

Narwoko, Dwi, dan Bagong Suyanto. 2019. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

S., Anwar. 1952. *Kamus Istilah Teknik Indonesia-Belanda*. Jakarta: Penerbit Buku Teknik H. STAM.

Sularto, St. 2007. *Kompas Menulis dari Dalam*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Suroso. 2021. *Jurnalisme Dasar Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.

Puspitawati, H. 2013. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor. PT IPB Press.

Sobur, Alex. 2002. *Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan Analisa Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya

E. Skripsi

Rizkita, Yanesa Dinf. 2020. *Wacana Kuasa Dan Pengetahuan Terkait Pelarangan Buku Kiri Dalam Talkshow Mata Najwa Program Studi S1 Ilmu Komunikasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Trimurtini, Winingsari. 2015. *Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama*

Tahun 1928 Di Yogyakarta Program Studi S1 Pendidikan Sejarah. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Maulid, Jafar Sidiq. 2021. *Kiprah P.K. Ojong Dalam Memajukan Majalah Star Weekly Di Indonesia Tahun 1951-1961 Program Studi S1 Pendidikan Sejarah*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.

F. Artikel Internet

Harianto, Jimmy S. 2022. *Hari-hari Seusai Kompas Dibredel Via Telepon*. Kompas.id. Selasa Februari 2022.

<https://www.kompas.id/baca/di-balik-berita/2022/02/04/kompas-dibreidel-via-telpon-wartawan-tetap-liputan>.

Supelli, Karlina. *Suara Ibu Peduli dalam Pledoi*, diakses dari *Jurnal Perempuan*. *Jurnal Perempuan.org*. Mei 1998. https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/pledoi_karlina_leksono.pdf (diakses Februari 18, 2025).